

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI NOTARIS  
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP  
JABATANNYA DI KOTA PADANG**

**TESIS**



**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Disusun Oleh :**

**HADRI HERLYNDA  
1520123051**

**PROGRAM PASCA SARJANA KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Azmi Fendri, SH.MKn**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Jean Elvardi, SH, MH**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI NOTARIS YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP JABATANNYA  
DI KOTA PADANG**

**ABSTRAK**

(Hadri Herlynda, 1520123051 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 108 Halaman, 2017)

Penerapan sanksi administrasi terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap jabatannya adalah wewenang dari pada Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilaksanakan secara hirarkhi/berjenjang. Ruang lingkup penerapan sanksi notaris berlaku bagi semua notaris yang melakukan pelanggaran yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa notaris melakukan pelanggaran terhadap jabatannya di Kota Padang, apa sajakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap jabatannya di Kota Padang, dan bagaimana penerapan sanksi Administrasi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya di Kota Padang.

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah penerapan sanksi administrasi bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatan notaris. sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berintegrasi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*deft interview*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Pelanggaran administrasi yang terjadi antara lain adalah : Seorang notaris yang diangkat sebagai anggota DPRD Kota di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang di duga melanggar Kode Etik Notaris sesuai dengan UUJN. Adanya penahanan sertifikat klien yang dilakukan oleh notaris sehingga mengakibatkan kerugian bagi klien tersebut. Adanya kurang hati-hatian notaris didalam melakukan pembuatan sebuah akta sehingga menimbulkan permasalahan pada pihak klien. Adanya penahanan sertifikat oleh notaris yang di duga melanggar kode etik notaris, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris maka hal ini diketahui notaris tersebut di anggap sudah mengambil sikap yang tepat.

Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN di Kota Padang, adalah : berupa teguran, peringatan serta pemberhentian secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Penerapan Sanksi administrasi, Notaris, Pelanggaran.

# ADMINISTRATIVE SANCTION IMPLEMENTATION FOR VIOLATED NOTARY TO OCCUPATION IN PADANG CITY

## ABSTRACT

(Hadri Herlynda, 1520123051, Master of Notary, Law Faculty Andalas University, 108 pages, Padang, 2017)

An apply of Administrative Sanction for Notaries who have broken their occupation are the Notary Supervisory Council Authority and Ministry of Justice and Human Rights gradually. The Scoupe of Notary sanction implementation is in effect to all of Notaries to have a misconduct as regulated in Law on Notary Occupation. The problem discussed in this thesis are as follows, Why are Notaries broken occupation in Padang City? What kinds of misconduct to have broken by Notaries to their occupation in Padang City and How administrative sanction applied to Notaries who have broken their occupation in Padang City. This research used Empirical Juridis approach of method. Juridis approach used to analyze various of regulation of legislation related to question the Applying of Administrative Sanction who have broken their occupation, whereas empirical approach used to analyze in the side of law understood as people behaviour who always interacted and related each other in aspect of society life. Research specification refered to analytic descriptive. Data collected method used intensive interview (*deft interview*) and *library research*. Administrative violation for example among others are a Notary appointed as a member of Assembly at Provincial, Regency (DPRD) in West Sumatera Province, estimated to break The code of ethic of Notary according to Law on Notary Occupation. There was a restraining clien's certificate done by Notary that caused financial loss, there was carelessness in making a deed that bring about clien's problem. There was a restraining sertificate by Notary that guessed to break the code of ethic of Notary, but after investigated by the Notary Supervisory Council and if it has been known by Notary so it considered Notary well done. Sanction execution given by the Notary Supervisory Honorary Council to violated Notary to Law on Notary Occupation in Padang City was a warning, remembrance or discharged unrespectfully by the Province Supervisory Council, The Central Supervisory Council and Ministry of Justice and Human Rights

Key Words : *Administrative sanction implementation*